

**PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND*, *POLITICAL BACKGROUND*
DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi kasus pada Badan Anggaran DPRD se-Eks Karisidenan Surakarta)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

YULIA AGUSTINA

B. 200 060 262

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara (UU No.32 Tahun 2004). Dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dipaparkan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah mengacu kepada Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semua sumber keuangan yang

melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan (UU) No. 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi (UU) No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membuka peluang yang sangat luas untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD (UU No. 32 Tahun 2004). Implikasi positif dari berlakunya UU tentang otonomi daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD. Diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang dimasyarakat, dan kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Secara umum, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 41 lembaga legislatif mempunyai 3 fungsi yaitu: (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Hal yang sangat kritis pada tahap perencanaan anggaran adalah perlunya penguatan pada sisi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan peran pengawasan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Th 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan PP no 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan menteri dalam Negeri (Pemedagri) No13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa otonomi daerah maupun Desentralisasi ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Hakekat semangat otonomi ini harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan daerah kepada masyarakat melalui DPRD tanpa adanya intervensi Pemerintah Pusat.

Kedudukan dan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan penting, karena berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 40 menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas maka jelas peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif yaitu masih rendahnya peran DPRD dalam keseluruhan proses atau keseluruhan anggaran baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun pengawasan program kerja eksekutif.

Beberapa kajian dilakukan tentang Peran DPRD. Khususnya dalam pengawasan keuangan daerah dengan mengaitkan peran DPRD dengan latar belakang Personal, latar belakang Politik, dan Pengetahuan dewan tentang anggaran. Banu Witono (2003) melakukan penelitian tentang Pengaruh latar Belakang Personal dan Budaya politik terhadap Peran DPRD dalam pengawasan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Latar Belakang Personal dengan dimensi Jenis Kelamin, Usia, Strata pendidikan, Bidang Pendidikan dan Pengalaman Politik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peran dan perilaku seorang. Dalam hal ini peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Faktor budaya politik sebagai variabel Independen, ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan hasil pengujian pengaruh moderasi budaya politik memperkuat hubungan antara latar belakang personal

dan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, terutama dimensi usia, strata pendidikan dan pengalaman politik.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk menulis dalam bentuk laporan penelitian dengan judul “*pengaruh personal background, political background dan pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan Keuangan Daerah*”.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas yang telah diuraikan sebelumnya maka dirumuskan pokok masalah penelitian:

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah *personal background* berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
3. Apakah *political background* berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris apakah variabel *personal background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja DPRD.
2. Bagi DPRD, sebagai masukan dalam pengawasan keuangan daerah dan didalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga DPRD dapat memberikan informasi mengenai bagaimana peranan DPRD
3. Diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.
4. Bagi partai politik, sebagai masukan dalam melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kader/calon legislatif bagi masing-masing partai.
5. Bagi akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen disektor publik.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini akan disajikan dalam lima bab yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pengantar yang menjadi pendahuluan dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dibahas mengenai *personal background* terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, *political background* terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangann daerah, pengetahuan dewan tentang anggaran, penelitian terdahulu serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan berbagai hal, diantaranya : populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian dan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga akan diperoleh kesimpulan akhir dari penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.